

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Gerakan sosial merupakan fenomena era modernitas yang berlangsung di masyarakat dimana gerakan sosial menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Gerakan sosial mengalami perubahan. Perubahan yang dihasilkan terdiri dari perubahan internal dan eksternal. Perubahan internal bisa mencakup berbagai macam perihal seperti keanggotaannya, ideologinya, pranatanya dsb. Sebagian lagi merupakan perubahan eksternal seperti perubahan pada struktur dan kultur masyarakat. Ke khas an gerakan sosial terletak pada keterkaitan antara perubahan internal dan perubahan eksternal. Gerakan sosial mendorong perubahan di masyarakat melalui proses mengubah dirinya sendiri. Dalam upaya memperkaya literatur untuk memahami dinamika internal dan eksternal gerakan sosial, penelitian ini dihadirkan.

Terdapat tiga tipe dalam gerakan sosial didasarkan atas corak tindakannya (Pamela, para _): (1) gerakan yang tindakannya dikendalikan oleh individu, (2) tindakan kolektif yang bukan bagian dari organisasi dan (3) gerakan sosial dimana tindakannya dilakukan oleh organisasi. Dalam penelitian ini, studi perubahan sosial didasarkan atas corak ketiga yakni gerakan sosial yang dikendalikan melalui organisasi gerakan sosial. Secara khusus adalah organisasi gerakan sosial petani. Gerakan petani adalah salah satu wujud dari sub konsep dalam gerakan sosial.

Peta gerakan petani yang menonjol lahir di negara dunia ketiga terutama dalam rangka memperjuangkan hak-hak atas tanah. Penguasaan tanah sangat penting bagi petani. Selain bernilai ekonomis, tanah juga juga bermakna religius-kosmis dan bahkan ideologis (Mustain: 2007; Topatimasang, 1998; Dhakidae, 1979; Basyar, 1979). Beberapa organisasi petani besar yang sering disebut dan mendapat reputasi internasional. Seperti gerakan petani di Amerika Latin dan Afrika Selatan.

Fauzi (2005), menggambarkan dalam telaahannya tentang gerakan petani di negara dunia ketiga. *Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) atau Pergerakan Pekerja Pedesaan Tak Bertanah adalah gerakan rakyat terbesar di wilayah

Amerika Latin. MST berdiri tahun 1985 sebagai respon atas ketimpangan agraria khususnya tanah di Brazil dimana 46 % dari semua tanah pertanian dikuasai oleh kurang dari 1% penduduk. MST melakukan mediasi aktif antara rakyat miskin dengan pemerintah untuk melegalisasi tanah-tanah yang telah diduduki oleh rakyat. MST juga secara aktif mengirimkan tenaga-tenaga guru, menyediakan kredit untuk produksi dan lainnya. Aktivitas ini telah menjadi daya tarik yang sangat besar bagi orang-orang miskin tidak bertanah untuk bergabung (14-17)

Di Meksiko, *Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional* (EZLN) atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Lahir pada 1 Januari 1994 tepat pada saat *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) sebagai tentangan langsung. Neoliberalisme yang dianut dalam NAFTA telah mengubah konstitusi Meksiko yang menjamin hak ketersediaan tanah bagi rakyat. Zapatista merupakan revitalisasi dari semangat Emilio Zapata (pahlawan petani Meksiko yang memperjuangkan reforma agraria) sepanjang masa revolusi. Gerakan Zapatista menghasilkan ruang-ruang baru bagi partisipasi politik masyarakat sipil dan mengilhami kelahiran organisasi non pemerintah secara besar-besaran ke isu yang lebih meluas pada tema-tema demokratisasi. Untuk memperoleh dukungan, Zapatista membawa masuk dukungan dari kelas menengah seperti: LSM, ormas, lembaga-lembaga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan kelompok kepentingan lainnya kedalam perjuangannya (18-23).

Di Afrika Selatan, *Landless People's Movement* (LPM), dibentuk tahun 2001 oleh organisasi-organisasi rakyat tidak bertanah dari berbagai daerah dan didukung oleh *National Land Committee* (NLC)-jaringan organisasi-organisasi non-pemerintah yang berpengaruh ditingkat nasional. LPM dibentuk sebagai tanggapan rakyat tidak bertanah atas kegagalan program *land reform* pemerintah paska rezim apartheid. LPM melakukan mobilisasi massa dengan menyatukan kekuatan di akar rumput.. Gerakan ini menentang pemisahan perjuangan kota dan desa dengan menegaskan bahwa pengusuran di kota dan ketiadaan jaminan hukum untuk penggarapan tanah adalah isu-isu yang secara fundamental terkait dengan akses tanah. (29-32).

Gejala yang sama, ketimpangan dalam distribusi kepemilikan tanah juga terjadi di Indonesia. Sehingga konflik perebutan tanah tidak bisa dihindari dan

memunculkan berbagai bentuk perlawanan. Penelitian Geertz (1963) di desa di Jawa mengantarkan pada kesimpulan bahwa telah terjadi kondisi yang disebutnya sebagai "*shared poverty*". Sejumlah gejala yang diajukan adalah penambahan penduduk, kepadatan penduduk yang tinggi, kecilnya luas lahan yang dimiliki, intensitas penggarapan dan kecilnya peluang pekerjaan non pertanian di desa.

Beberapa gejala yang disebutkan Geertz masih relevan untuk menjelaskan situasi masyarakat pedesaan di Jawa. Kecilnya luas lahan yang dimiliki tidak memungkinkan bagi petani untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sementara sejumlah besar lahan yang ada di desa kuasai oleh segelintir kecil orang. Disamping, kegagalan program *land reform* yang menyuburkan berbagai bentuk konflik agraria dan perlawanan petani.

Latar belakang konflik pertanahan di pedesaan umumnya berakar dalam perebutan tanah antara pihak perkebunan swasta maupun milik pemerintah dengan petani. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek yakni perusahaan perkebunan swasta (PTP) yang difasilitasi oleh negara melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU) yang dahulunya merupakan hak *erfpacht* yang dikonversi oleh Orde Baru. Konversi *erfpacht* menjadi HGU ini sebenarnya bertentangan dengan pasal III (1) dan pasal III (2) bagian Kedua tentang Ketentuan-ketentuan Konversi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: (1) Hak *erfpacht* untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak *erfpacht* tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun, (2) Hak *erfpacht* untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut dihapus, dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Gerakan perlawanan di masa lalu yang tercatat seperti Pemberontakan Petani Banten 1888 (S.Kartodirdjo, 1984). Sementara itu, dalam hal pengorganisasian perlawanan petani pada masa pergerakan nasional juga mempunyai tradisi yang panjang. Pada masa itu, pengorganisasian tani diawali oleh tokoh-tokoh kiri Indonesia seperti Semaun, Alimin, Darsono dan Tan Malaka. Kelompok ini, awalnya menggabungkan pengorganisasian mereka ke dalam Sarikat Islam (SI). Sarekat Islam adalah

organisasi yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang bertujuan memajukan perdagangan kaum bumiputra khususnya Islam dari dominasi Tionghoa dan Eropa. Kemudian SDI mengubah dirinya menjadi SI untuk menggalang dukungan yang lebih luas dan tidak terbatas pada kelompok pedagang. Perubahan tersebut membuat SI semakin gencar mencari basis dukungan ditingkat masyarakat kecil. Namun, perbedaan pandangan ideologis kemudian memecah SI yang kemudian melahirkan SI merah dan SI putih. Pada akhirnya, kedua kelompok ini kemudian melahirkan dua kelompok penting yakni: Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

PKI dibawah pimpinan Semaun dan Darsono kemudian merencanakan pemberontakan pada tahun 1926. Rencana ini ditentang oleh Tan Malaka, karena menganggap bahwa basis pengorganisasian masih lemah dan PKI sangat diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, pemberontakan ini tetap yang terjadi di Delanggu, Solo, Malang Selatan, dan Silungkang (Sumatera Barat) dan mengalami kegagalan. Hal ini telah mengakibatkan kemunduran yang cukup penting dalam perjuangan kemerdekaan nasional (Soe Hok Gie: 1964). Sebab telah mengakibatkan penangkapan besar-besaran tokoh dan pemimpin pergerakan nasional yang kemudian dibuang ke Boven Digul, Papua. Meski demikian, pembuangan tokoh-tokoh utama pergerakan nasional tersebut telah semakin menyemai tumbuhnya bibit nasionalisme Indonesia.

Setelah kemerdekaan, kelahiran organisasi-organisasi petani kembali marak. Bahkan, hasil pengorganisasian PKI kemudian pada tahun 1950-an berkonsolidasi dengan Barisan Tani Indonesia (BTI). Organisasi semacam ini kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya misalnya Petani Nahdatul Ulama (PETANU) di bawah Partai Nahdatul Ulama (NU) dan PETANI di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI).

Organisasi-organisasi inilah yang menjadi motor utama dalam mendesak pemerintah dan parlemen dalam menghasilkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang mengamanatkan pemerintah menjalankan pembaruan agraria (*land reform*). Namun, dalam perkembangannya kemudian BTI adalah organisasi tani yang paling kuat diasosiasikan dengan penggerak *land reform*. Gerakan tani menjadi kekuatan

nasional pada saat tersebut ditunjang dengan klaim bahwa BTI memiliki anggota antara lima hingga delapan juta anggota atau 25% dari penduduk pedesaan di Jawa.

Dalam perkembangannya, pengidentikan BTI dengan *land reform* telah berakibat buruk pada kelanjutan program ini paska kejatuhan Soekarno di tahun 1966. Sehingga, setelah naiknya Orde Baru menggantikan Orde Lama, *land reform* menjadi tabu dibicarakan apalagi dijadikan sebagai program pemerintah.

Akibatnya, struktur agraria nasional relatif tidak berubah sejak era kolonial hingga sekarang. Sebagai gambaran, jumlah petani gurem (petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha) ditunjukkan dalam tabel dibawah.

Tabel I.1. Hasil Sensus Pertanian 2003 tentang Jumlah Petani Gurem

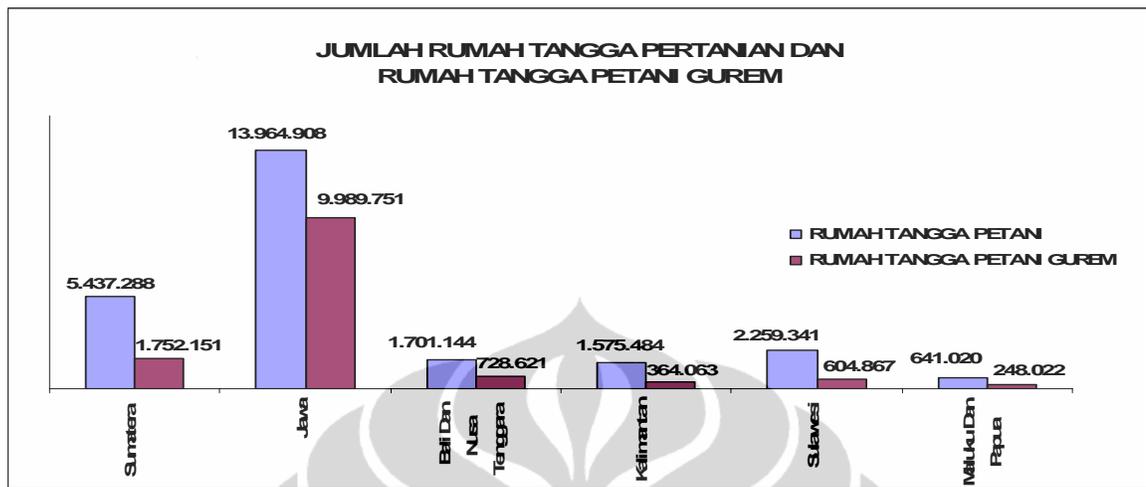
No.	Uraian	1993	2003	Catatan
1	Jumlah Rumah Tangga Pertanian	20,8 Juta	25,4 Juta	Naik 2,2%/tahun
2	Jumlah Petani Gurem (Lahan Usaha < 0,5 Ha/KK)	10,8	13,7	Naik 2,6%/tahun
3	% RT Petani Gurem/RT Petani Pengguna Lahan	52,7 %	56,5%	Petani Semakin Miskin

Sumber: Makalah yang disajikan oleh Badan Planologi Kehutanan (2006), telah diolah kembali

Hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan peningkatan jumlah petani gurem (petani dengan pemilikan lahan kurang dari 0,5 ha) pada tahun 2003 menjadi 56,5 %. Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani gurem meningkat sebanyak 2,6 % / tahun.

Sementara itu, distribusi petani gurem terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari 13.964.908 jumlah rumah tangga petani di Jawa, 9.989.751 adalah petani gurem.

Tabel I.2. Jumlah Rumah Tangga Pertanian dan Rumah Tangga Petani Gurem



Sumber: BPS, Susenas, 2003

Dimasa Orde Baru, petani dilarang mendirikan organisasi di luar organisasi tani yang diakui oleh pemerintah yakni Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Organisasi ini sendiri didirikan oleh pemerintah untuk mengarahkan keseluruhan petani mendukung program pembangunan ekonomi khususnya di bidang pertanian yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Usaha ini dapat berjalan mulus seiring politik otoritarianisme dan politik massa mengambang yang dijalankan oleh pemerintah di pedesaan.

Namun, setelah jatuhnya Soeharto, beragam organisasi tani baik di level nasional maupun lokal terus bertumbuhan. Saat ini, di level nasional di luar HKTI, setidaknya terdapat enam organisasi nasional petani yaitu: Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Aliansi Petani Indonesia (API), Dewan Tani Indonesia (DTI), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Tani Nasional (STN). Inisiatif pembentukannya bukan oleh pemerintah melainkan difasilitasi oleh organisasi masyarakat sipil. Sementara itu, ratusan organisasi di tingkat kabupaten juga tumbuh menjadi bagian dari organisasi nasional petani tersebut.

Ciri terpenting dari gerakan petani yang lahir setelah kejatuhan Soeharto adalah organisasi petani melakukan pendudukan kembali tanah-tanah mereka yang diambil pada masa Soeharto (reklam), dan juga gerakan pendudukan tanah oleh petani karena alasan-alasan ekonomis (okupasi). Gerakan petani lokal yang melakukan reklamining umumnya berafiliasi dengan organisasi yang lebih besar hingga tingkat nasional.

Di Jawa, masyarakat petani yang terlibat dalam konflik perebutan hak atas tanah kebanyakan merupakan *peasant society*-masyarakat petani yang belum banyak bergeser dari stratifikasi sosial terendah seperti yang dikemukakan oleh BTI dalam penelitiannya, yakni (a) kelas tuan tanah; (b) petani kaya; (c) petani menengah; (d) petani gurem dan buruh tani (Aditjondro 6; Mortimer, p 3-4).

Tidak hanya secara nasional, dalam tingkatan geografis yang lebih kecil sejumlah organisasi perlawanan petani lokal lahir dan berkembang. Salah satu organisasi yang aktif melakukan perlawanan di Jawa adalah Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T). P4T berdiri bulan April tahun 1999 dengan jumlah anggota yang terdiri dari sekitar 450 KK petani penggarap. P4T berhadapan dengan PTP Tratak dengan dalam konflik perebutan tanah. PTP Tratak adalah perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang lahannya diduduki. Anggota P4T berasal dari desa/dukuh disekitar perkebunan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Bandar. P4T adalah anggota dari organisasi petani yang lebih besar yakni Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

P4T lahir sebagai respon terhadap situasi politik nasional yang ricuh saat kejatuhan Soeharto dan situasi dimasyarakat yang dipenuhi oleh kekecewaan atas perusahaan perkebunan yang dipandang menguasai tanah secara luas ditengah petani yang mayoritas tidak memiliki lahan (*landless*). Dari sisi kesejarahan, wilayah P4T memiliki kedekatan dengan sejumlah catatan perlawanan oleh gerakan petani di masa lampau.

Gerakan perlawanan P4T membawa dampak perubahan secara langsung dari sisi struktur agraria. Tidak hanya pada struktur agraria, kehadiran P4T menimbulkan konsekuensi pada hubungan-hubungan sosial dan lapisan sosial di masyarakat.

Melalui proses cukup panjang sejak pendiriannya saat ini masyarakat mulai memperoleh hasil nyata dari reklamasi dengan menanam lahan dan memetik hasil panen padi, palawija dan tanaman lainnya. Sementara itu, usaha untuk perubahan struktural untuk memperoleh kepastian hukum kepemilikan tanah terus dilakukan.

Dengan perubahan struktur agraria, disamping perolehan keuntungan secara ekonomis ternyata terjadi juga perubahan sosial yang lain. Pasalnya, banyak penduduk yang dahulunya buruh tani, atau petani tak bertanah bisa memperoleh tanah.

Observasi awal menunjukkan adanya kehadiran individu-individu dan kelompok-kelompok berpengaruh baru di wilayah konflik agraria setelah kehadiran organisasi. Para pengurus organisasi petani telah memperoleh tempat tersendiri dalam hubungan-hubungan sosial di pedesaan, dan dalam hal-hal tertentu mampu menyaingi pengaruh aparat desa. Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa para petani ini sebenarnya menggarap tanah-tanah yang di atasnya terdapat hak perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU). Sehingga, pandangan bahwa tanah tersebut setiap saat dapat diambil alih oleh pihak perkebunan melalui tangan kekuasaan masih terus menghinggapai psikologi para petani.

Dalam suasana seperti ini, ketegangan seringkali terjadi dengan munculnya berbagai isu yang senantiasa dimanfaatkan oleh para pihak yang menentang keberadaan organisasi. Nampaknya gema gerakan tani yang semakin meluas juga telah menarik berbagai pihak yang bersimpati seperti aktivis LSM, akademisi, anggota DPR, Komnas HAM dll yang dimanfaatkan oleh P4T untuk menunjukkan bahwa mereka juga mendapatkan dukungan luas.

Di tengah aktivitas yang secara khusus bertujuan melakukan legalisasi atas tanah-tanah hasil reklamasi, situasi eksternal di luar petani juga terus berubah. Perubahan eksternal yang berubah cepat tersebut khususnya dalam perkembangan ekonomi diluar pertanian yang cepat. Sedikit banyak, perubahan itu telah memperlihatkan kenyataan bahwa taraf kehidupan ekonomi petani yang terlibat dalam gerakan okupasi, meskipun membaik ternyata tidak signifikan dibandingkan dengan percepatan perubahan eksternal. Sehingga mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan.

Dalam merespon perubahan-perubahan eksternal organisasi tersebut, tentu saja pandangan subyektif dari P4T lebih mengemuka, khususnya perjuangan mereka dalam melegalisasi tanah yang telah mereka duduki. Namun, melihat perubahan di lingkungan eksternal mereka terlihat bahwa organisasi semacam P4T sebenarnya harus mempunyai pegangan-pegangan baru dalam menata organisasinya. Pegangan-pegangan yang bisa berdasarkan atas pemetaan terhadap situasi internal dan eksternal.

I.2. Rumusan Masalah

Dokumentasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan sejak 1970 hingga tahun 2005 tercatat 1870 konflik agraria. Jumlah konflik yang sangat besar ini bertitik tolak pada perebutan sumber-sumber agraria khususnya tanah. Sehingga, dengan jelas kita dapat melihat bahwa tengah terdapat sebuah persoalan besar dalam struktur agraria di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan salah satunya berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2003 (BPS: 2004) menampakkan peningkatan jumlah petani gurem (petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 ha) pada tahun 2003 menjadi 56,5 %. Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani gurem meningkat sebanyak 2,6 % / tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 2003. Padahal, untuk bisa memenuhi kebutuhan secara layak, paling tidak dibutuhkan sekitar dua hektar lahan garapan untuk setiap keluarga.

Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) merupakan salah satu organisasi gerakan petani di Jawa Tengah dibawah payung Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB). PTP. Tratak adalah satu dari 1887 pengusaha perkebunan yang menguasai tanah di Indonesia. 1887 perusahaan perkebunan tersebut tercatat menguasai tanah seluas 3.358.071 ha (Badan Pertanahan Nasional, 2002 seperti dikutip RACA Institute, 2002)

Kelahiran organisasi gerakan sosial petani ini didorong oleh kebutuhan untuk memiliki alat produksi yaitu lahan garapan yang selama ini tidak dimiliki. Selain itu situasi politik di tingkat nasional memberikan momentum bagi kelahiran gerakan sosial. Dalam torehan sejarah lokal pun menunjukkan sejarah perlawanan petani.

Perlawanan petani memiliki catatan panjang yang terus berlangsung dengan karakternya masing-masing dalam setiap masa.

Kehadiran P4T mendorong perubahan yang merupakan dampak dari segenap tindakan yang dilakukan untuk mengupayakan keadilan terhadap struktur kepemilikan tanah. Tindakan yang dimaksud mencakup juga reklamasi dan okupasi terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh PT. Tratak. Pada saat yang bersamaan, dalam tubuh organisasi juga berlangsung dinamika perubahan. P4T mengalami proses perubahan dari sisi internal berbarengan dengan usahanya untuk mengupayakan perubahan sosial dengan cara yang efektif.

Perubahan sosial terlihat dari berbagai sisi: taraf kehidupan, hubungan-hubungan sosial, lapisan sosial akibat perubahan pada struktur agraria, dan sejumlah perubahan lain. Dari sisi internal terjadi evolusi dalam tipe gerakan, pengorganisasian, model mobilisasi dll.

Saat ini yang terpenting adalah memastikan bahwa kehadiran gerakan sosial petani membawa perubahan yang signifikan positif ke arah perubahan sosial yang lebih baik. Seperti tujuan perubahan yang diharapkan.

Dari rumusan masalah, pertanyaan yang hendak dijawab melalui penelitian adalah:

- 1. Apa dan bagaimana bentuk-bentuk perubahan sosial yang timbul setelah kehadiran organisasi gerakan petani ?**
- 2. Bagaimana dinamika dari sisi mobilisasi yang berlangsung secara bersamaan dengan terjadinya perubahan-perubahan di masyarakat?**
- 3. Apa dan bagaimana kaitan antara mobilisasi dengan pencapaian tujuan perubahan yang diharapkan oleh organisasi gerakan petani ?**

I.3. Tujuan

I.3.1. Umum

Menjelaskan tentang gerakan sosial petani dari sisi perubahan sosial yang ditimbulkan dan dinamika mobilisasi organisasi yang berlangsung secara bersamaan.

I.3.2. Khusus

1. Mengungkapkan bentuk-bentuk perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kehadiran organisasi tani
2. Menggambarkan dinamika dalam tubuh gerakan petani dari sisi mobilisasi yang berlangsung secara bersamaan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat
3. Menjelaskan keterkaitan antara mobilisasi dengan pencapaian tujuan perubahan yang diharapkan organisasi gerakan petani

I.4. Signifikansi Penelitian

I.4.1. Bagi P4T

Penelitian ini bermanfaat secara langsung bagi petani dan secara khusus bagi P4T untuk membantu merefleksikan gerakannya. Diharapkan bahwa hasil penelitian akan bermanfaat bagi P4T sebagai masukan untuk penegasan atau reorientasi strategi jika dibutuhkan. Penelitian ini melakukan kajian atas dinamika internal dan eksternal gerakan. Dinamika internal dan eksternal saling terkait dimana perubahan dalam tubuh gerakan seharusnya mendorong perubahan sosial secara efektif seperti yang diharapkan.

I.4.2. Bagi Masyarakat

Orientasi perjuangan P4T adalah mewujudkan struktur agraria yang berkeadilan dimana penelitian menjadi salah satu sarana yang diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap pemberian dasar bagi pengembangan strategi perjuangan gerakan serupa. Keadilan dalam struktur agraria ini akan memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses terhadap kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria khususnya tanah. Sebab, tanah merupakan faktor produksi terpenting terutama bagi masyarakat tani. Diharapkan, dengan dimilikinya akses terhadap sumber agraria secara adil akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui upaya pengelolaan tanah tersebut secara produktif.

I.4.3. Bagi Akademisi

Penelitian ini akan memberi sumbangan konsep dan teori tentang perubahan sosial akibat kehadiran gerakan sosial yang berlangsung bersamaan dengan perubahan dari sisi internal gerakan. Diharapkan agar penelitian ini akan turut memperkaya literatur tentang gerakan sosial dari perspektif perubahannya. Selama ini tidak banyak penelitian di Indonesia yang memfokuskan kajian gerakan pada perspektif perubahannya.

I.4.4. Bagi pengambil kebijakan

Penelitian ini akan menghadirkan realitas ketimpangan struktur agraria dan akibatnya kepada struktur sosial secara umum di masyarakat petani. Kemunculan gerakan perlawanan petani merupakan cerminan atas ketidakadilan agraria dimana negara berperan melalui pemberian HGU dan ketidaktegasan dalam pemberian hak kelola lahan kepada masyarakat. Diharapkan, hasil penelitian ini akan turut mendorong lahirnya kebijakan yang mempercepat penyelesaian kasus dan akhirnya mendorong kelahiran kebijakan pembaruan agraria di Indonesia.

I.5.Batas-batas penelitian

Dalam kurun waktu yang relatif singkat dari periodisasi penelitian yakni sejak tahun 1999 yang merupakan tonggak awal kelahiran P4T hingga saat ini, perubahan sosial tidak akan nampak mencolok dan signifikan di permukaan dan penelitian ini terbatas hanya mengungkap gejala perubahannya berdasarkan temuan empiris dalam skala mikro. Apalagi untuk sebuah proses transformasi sosial yang umumnya berlangsung dalam proses rekonstruksi yang cukup panjang. Namun dari sudut internal gerakan, relatif bisa terbaca pergerakannya.

Gerakan sosial yang menjadi subyek penelitian adalah organisasi gerakan petani yang yakni Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T)-organisasi yang lahir sebagai respon terhadap situasi sosial politik ekonomi yang memburuk ditandai dengan kejatuhan rezim orde baru dan secara khusus adalah respon terhadap ketimpangan dalam struktur agraria. Sehingga bisa dikemukakan bahwa kelahiran P4T tidak disiapkan kelahirannya secara sistematis sehingga meskipun memiliki anggota yang relatif cukup besar di desa (380 KK), manajemen administrasi organisasi masih dikelola secara sederhana dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang terbatas.

P4T hingga saat ini masih terus membenahi organisasinya dengan segala keterbatasannya dengan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak terutama melalui organisasi payung yakni Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) . Di sisi adminisitratif, pendokumentasian kegiatan dan data-data lain terkait dengan perjuangan petani belum tertata dengan baik sehingga beberapa informasi penting bisa saja tidak ditemukan catatan tertulis atau rekaman dalam bentuk lain semisal gambar. Sehingga dalam kasus demikian, akan sangat bergantung pada informasi lisan dari sumber-sumber yang terlibat langsung dan layak untuk diterima. Namun, dilakukan upaya untuk memperoleh informasi dari sumber lain secara silang untuk menguatkan validitas temuan.

Dari sisi metodologi, pilihan metode riset aksi memungkinkan terjadinya bias karena metode ini mensyaratkan adanya partisipasi. Dalam penelitian partisipatif, hal ini merupakan konsekuensi pemilihan metode. Namun demi meminimalkan kemungkinan terjadinya bias, triangulasi teknik penelitian diterapkan disamping pengambilan peran peneliti utama yang lebih dioptimalkan pada tahapan analisa data dan verifikasi informasi temuan lapangan.

I.6. Asumsi

Keberadaan gerakan sosial membawa perubahan secara langsung pada situasi sosial di masyarakat. Hal ini disebabkan karena gerakan sosial melancarkan sejumlah strategi dan taktik yang mempengaruhi diri dan lingkungannya. Gerakan sosial mengorganisir dan melakukan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengantarkannya pada tujuan perubahan yang diharapkan. Pengorganisasian dan mobilisasi oleh gerakan sosial menyebabkan perubahan dalam gerakan sosial. Artinya bahwa perubahan sosial yang dihasilkan oleh gerakan sosial berjalan beriringan dengan perubahan dalam tubuh gerakan.

BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	9
I.3. Tujuan.....	11
I.3.1. Umum.....	11
I.3.2. Khusus.....	11
I.4. Signifikansi Penelitian.....	11
I.4.1. Bagi P4T.....	11
I.4.2. Bagi Masyarakat.....	12
I.4.3. Bagi Akademisi.....	12
I.4.4. Bagi pengambil kebijakan.....	12
I.5. Batas-batas penelitian.....	13
I.6. Asumsi.....	14

